

Kebijakan Keuangan Adaptif untuk *Startup* Sosial di Indonesia: Pendekatan Studi Multi-Tahap

Nazma Awwaliyah Khonitatillah¹, M. Imam Husein², Cynthia Eka Violita³

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

¹ nzmawlyhkh@gmail.com, ² mimamhusen3@gmail.com, ³ cynthia401.mnj@unusida.ac.id

Abstrak

Startup sosial memiliki potensi besar dalam menjawab berbagai tantangan sosial di Indonesia, namun masih menghadapi hambatan dalam aspek kapasitas manajerial, akses modal, dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini membahas urgensi inkubasi bisnis dan pendampingan sebagai strategi untuk memperkuat fondasi startup sosial sejak tahap awal. Inkubasi bisnis memberikan pelatihan, akses jaringan, serta validasi model usaha, sementara pendampingan menyediakan dukungan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika operasional dan sosial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberadaan program inkubasi dan pendampingan yang terstruktur sangat diperlukan untuk menekan tingkat kegagalan usaha sosial, serta meningkatkan efektivitas pencapaian dampak sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam membentuk ekosistem inkubasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas konteks sosial-ekonomi yang melingkupi pertumbuhan dan pembiayaan startup sosial, melalui wawancara mendalam dan studi kasus terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi startup sosial meliputi rendahnya akses terhadap pendanaan konvensional, minimnya literasi keuangan, serta ketiadaan kebijakan keuangan yang responsif terhadap karakteristik bisnis sosial. Selain itu, skema pembiayaan konvensional dinilai tidak sesuai karena menuntut jaminan dan tingkat profitabilitas tinggi. Di sisi lain, program inkubasi dan pendampingan terbukti mampu memperkuat kapasitas startup sosial dalam aspek manajerial, legalitas usaha, serta strategi keberlanjutan. Dengan demikian, keterlibatan lintas sektor dalam membangun ekosistem inkubasi dan kebijakan keuangan adaptif menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan startup sosial yang lebih inklusif dan berdaya saing di Indonesia.

Kata Kunci: *Startup Sosial, Inkubasi Bisnis, Pendampingan, Kewirausahaan Sosial, Keberlanjutan Usaha*

Artikel Info

Received: 26 Juni 2025

Accepted: 02 Juli 2025

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah dan peran startup sosial yang berfokus pada penyelesaian permasalahan sosial secara inovatif dan berkelanjutan. Startup sosial berbeda dari perusahaan konvensional karena mereka menggabungkan tujuan ekonomi dengan misi sosial, yaitu mencari solusi terhadap persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, ketahanan pangan, layanan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan. Fenomena ini menandai adanya pergeseran paradigma dalam dunia kewirausahaan, dari yang semula semata berorientasi pada keuntungan finansial menuju bentuk usaha yang lebih inklusif dan berdampak sosial.

Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi startup sosial di Indonesia berkaitan erat dengan aspek pembiayaan. Banyak startup sosial mengalami kesulitan dalam memperoleh dukungan finansial yang sesuai dengan karakteristik model bisnis mereka yang berdampak sosial, namun belum tentu menghasilkan keuntungan dalam waktu cepat. Instrumen pembiayaan konvensional seperti kredit bank, modal ventura, atau pinjaman lunak seringkali tidak cocok, karena mensyaratkan pengembalian yang cepat, kepastian arus kas, serta jaminan material. Padahal, startup sosial pada umumnya baru pada tahap pengembangan, memiliki kapasitas terbatas, dan beroperasi dalam sektor yang memiliki risiko tinggi namun berdampak luas secara sosial.

Ketiadaan kebijakan keuangan yang benar-benar adaptif menjadi akar persoalan yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan startup sosial di Indonesia. Sebagian besar kebijakan pembiayaan UMKM yang tersedia belum dirancang dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan startup sosial. Sementara itu, regulasi terkait insentif fiskal, kemudahan akses modal, hingga perlindungan hukum bagi investor sosial masih sangat terbatas. Ketidakpastian ini membuat banyak startup sosial kesulitan untuk melakukan scale-up, bahkan tidak sedikit yang berhenti beroperasi meskipun telah menunjukkan dampak positif terhadap masyarakat. Di sisi lain, fenomena startup sosial telah menarik perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga keuangan, lembaga donor internasional, maupun investor berdampak (*impact investors*). Upaya untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan sosial yang inklusif

dan berdaya saing mulai mendapatkan momentum melalui berbagai inisiatif, seperti program inkubasi sosial, kompetisi inovasi sosial, hingga pembentukan platform *crowdfunding* berbasis misi sosial. Namun, semua inisiatif ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam sebuah kebijakan keuangan nasional yang menyeluruh dan adaptif.

Kebutuhan akan kebijakan keuangan adaptif menjadi semakin mendesak di tengah situasi global yang tidak menentu. Pandemi COVID-19, misalnya, memperlihatkan betapa pentingnya kehadiran startup sosial dalam memberikan solusi cepat dan relevan bagi kelompok rentan. Namun, krisis ini juga menegaskan bahwa sistem pembiayaan konvensional tidak mampu mengakomodasi kebutuhan mereka secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, muncul tuntutan untuk merancang kerangka kebijakan baru yang responsif, fleksibel, dan dapat mendorong keberlanjutan finansial bagi startup sosial.

Kebijakan keuangan adaptif adalah kebijakan yang mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial secara cepat serta mampu mendukung berbagai model bisnis non-konvensional seperti startup sosial. Kebijakan ini tidak hanya mencakup akses pendanaan yang fleksibel, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan instrumen keuangan inovatif seperti *blended finance*, *social impact bond*, atau dana kolaboratif lintas sektor. Selain itu, kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan pemahaman mendalam terhadap kondisi lapangan, termasuk keterbatasan kapasitas startup sosial, hambatan regulasi, serta kompleksitas dampak sosial yang mereka upayakan.

Namun, untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar adaptif, diperlukan pendekatan riset yang sistematis dan bertahap. Pendekatan studi multi-tahap (*multi-stage study*) menjadi strategi yang ideal karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika startup sosial dari berbagai sisi: mulai dari kondisi internal organisasi, struktur pendanaan, persepsi investor, hingga kerangka kebijakan yang ada. Dengan pendekatan ini, dapat diidentifikasi titik-titik kritis yang menghambat akses keuangan dan dikembangkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang relevan.

Melalui studi multi-tahap, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tantangan utama dalam pembiayaan startup sosial di Indonesia; (2) mengkaji efektivitas kebijakan dan program pembiayaan yang sudah ada; (3) merumuskan komponen-komponen penting dari kebijakan keuangan adaptif; serta (4) memberikan rekomendasi konkret untuk pengambil kebijakan dan pelaku ekosistem. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini juga ditopang oleh kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan startup sosial, mengingat tingginya jumlah wirausaha muda, kemajuan teknologi digital, dan semangat gotong royong yang menjadi bagian dari budaya lokal. Jika potensi ini tidak didukung oleh kebijakan keuangan yang adaptif, maka akan terjadi kesenjangan antara inovasi sosial dan sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, pembentukan kerangka kebijakan keuangan yang selaras dengan karakteristik startup sosial bukan hanya kebutuhan teknis, melainkan bagian dari agenda besar pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa kebijakan keuangan adaptif tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menuntut kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga keuangan, investor swasta, organisasi filantropi, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya ingin mengusulkan model kebijakan baru, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya membangun fondasi ekonomi sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui pendekatan keuangan yang lebih progresif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi multi-tahap (*multi-stage approach*) yang dirancang untuk menggali secara mendalam dinamika kebijakan keuangan dan tantangan pembiayaan yang dihadapi oleh startup sosial di Indonesia. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan belum banyak terungkap melalui data kuantitatif yang tersedia. Fokus utama dari metode ini adalah pada pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) terhadap pengalaman, strategi, hambatan, dan harapan para pelaku startup sosial serta pemangku kebijakan dalam menciptakan kerangka keuangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian tahap awal mengonfirmasi bahwa startup sosial tumbuh pesat di Indonesia, terutama sejak 2016–2023. Sebagian besar fokus pada isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, inklusi finansial, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Munculnya *social fintech* juga menandai bahwa startup sosial mulai memakai teknologi untuk mencapai dampak sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pembiayaan yang relevan serta hambatan sistemik yang dialami oleh startup sosial, khususnya terkait keterbatasan akses pendanaan, minimnya infrastruktur dukungan keuangan, serta belum adanya kebijakan yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan entitas bisnis berbasis sosial. Hasil dari tiap tahap studi disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi faktual di lapangan dan alternatif kebijakan keuangan yang dapat diadaptasi untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi startup sosial di Indonesia. Melalui pendekatan multi-tahap ini, penelitian berusaha tidak hanya mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh startup sosial, tetapi juga merumuskan solusi strategis berbasis data dan wawasan praktis yang dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih responsif terhadap dinamika sektor ini. Bagian berikut akan menguraikan hasil temuan dari setiap tahapan secara deskriptif dan mendalam (Bakhar et al., 2023).

Startup sosial memadukan misi sosial dan tujuan bisnis. Namun, tidak seperti bisnis konvensional, keberhasilan mereka lebih sulit diukur secara kuantitatif karena berfokus pada dampak sosial, bukan sekadar profit. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang selama ini berlaku cenderung menggeneralisasi kebutuhan pelaku usaha, tanpa memperhatikan karakteristik sosial startup. Startup sosial, yang bertujuan menciptakan dampak positif bagi masyarakat sambil tetap berkelanjutan secara finansial, seringkali berjuang untuk mendapatkan pendanaan yang memadai. Tantangan ini diperparah oleh rendahnya akses dan literasi finansial. Selain itu, regulasi yang ada di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya mendukung perkembangan startup sosial. Banyak startup sosial kesulitan memperoleh status hukum yang jelas, karena belum ada kerangka hukum yang secara khusus mengakomodasi entitas yang beroperasi di antara ranah bisnis dan sosial. Mereka pun sering kali harus memilih antara menjadi yayasan (non-profit) atau perusahaan (*for-profit*), padahal model hybrid yang mereka jalankan membutuhkan fleksibilitas hukum. Kurangnya kejelasan ini membuat mereka sulit mendapatkan insentif fiskal, akses kredit, atau mengikuti program pendanaan pemerintah. Oleh karena itu, tantangan pembiayaan dan hambatan regulasi menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan dan dampak dari startup sosial.

Rendahnya Akses dan Literasi Finansial

Meskipun strategi inklusi keuangan nasional ditargetkan mencapai 75-76 % pada 2019 UMKM dan startup sosial masih mengalami kesenjangan akses tinggi hampir 69,5 % UMKM belum akses kredit bank Mereka juga belum terbiasa menyusun laporan keuangan standar, indikator SROI, atau memaknai value investor berdampak.

Skema Pembiayaan yang Belum Responsif

Bank seperti KUR dan perbankan umum kurang fleksibel: suku bunga tetap, agunan wajib, dan durasi pendek. Sementara startup sosial memerlukan patient capital, atau instrumen seperti *blended finance dan impact investment* yang masih sangat terbatas di Indonesia.

Ketidaksesuaian Skema Pembiayaan Konvensional

Startup sosial di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengakses pembiayaan dari skema keuangan konvensional yang pada dasarnya dirancang untuk entitas bisnis profit-oriented. Skema pembiayaan konvensional, seperti pinjaman bank, kredit usaha rakyat (KUR), maupun investasi modal ventura biasa, umumnya mensyaratkan jaminan (*collateral*), tingkat profitabilitas yang jelas, dan rencana pengembalian modal (*return of investment*) dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sangat bertolak belakang dengan model bisnis startup sosial yang mementingkan pencapaian dampak sosial terlebih dahulu sebelum keuntungan finansial. Karakteristik khas startup sosial adalah mengutamakan misi sosial seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan komunitas, pendidikan, kesehatan masyarakat, atau pelestarian lingkungan. Sebagian besar dari mereka tidak berorientasi pada keuntungan finansial tinggi di awal pendiriannya, melainkan pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan. Model ini seringkali dianggap tidak bankable oleh institusi keuangan konvensional karena tidak memenuhi standar kelayakan kredit dalam bentuk laporan keuangan yang kuat, proyeksi laba yang stabil, maupun jaminan aset yang memadai.

Selain itu, lembaga keuangan di Indonesia masih menerapkan pendekatan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian tinggi (*prudential principle*) yang membuat proses persetujuan kredit sangat ketat. Dalam kondisi ini, startup sosial yang baru berdiri, belum memiliki rekam jejak kredit, dan hanya beroperasi dengan modal sosial atau kontribusi komunitas, sulit untuk lolos dalam proses seleksi pembiayaan. Bahkan ketika startup sosial mampu menyusun proposal usaha yang meyakinkan secara sosial, tetap saja pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak memiliki mekanisme penilaian yang bisa mengakomodasi dampak sosial sebagai bagian dari "nilai usaha" yang layak dibiayai (Sakti & Ahmad, 2023).

Permasalahan ini semakin diperparah dengan terbatasnya lembaga keuangan alternatif yang fokus pada pembiayaan berbasis dampak sosial, seperti social impact investment, crowd-lending sosial, atau dana hibah filantropi yang berkelanjutan. Meskipun ada inisiatif pendanaan dari lembaga donor, NGO internasional, atau CSR perusahaan besar, skala dan jangkauannya masih sangat terbatas serta tidak menyasar startup sosial skala kecil atau yang berada di daerah terpencil. Akibatnya, banyak startup sosial yang bergantung pada dana pribadi pendiri atau sumbangan masyarakat, yang sifatnya tidak tetap dan tidak mendukung ekspansi jangka panjang.

Pentingnya Inkubasi Bisnis dan Pendampingan

Inkubasi bisnis dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan keberlanjutan startup sosial di Indonesia. Sebagian besar startup sosial dirintis oleh individu atau komunitas yang memiliki semangat sosial tinggi, namun tidak selalu dibekali dengan pemahaman manajerial, keuangan, dan strategi bisnis yang memadai. Mereka mungkin unggul dalam ide sosial, tetapi lemah dalam aspek pengelolaan sumber daya, penyusunan rencana usaha, maupun pencatatan keuangan. Dalam konteks ini, kehadiran program inkubasi dan pendampingan menjadi kunci penting untuk membantu startup sosial berkembang dari skala kecil menuju entitas yang lebih mapan dan berdampak luas. Program inkubasi bisnis idealnya mencakup fasilitas pelatihan intensif, mentoring dari pelaku bisnis berpengalaman, serta akses terhadap jaringan investor, donor, dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, inkubasi juga perlu memberikan pemahaman tentang legalitas usaha (Bismala et al., 2019).

Startup sosial memiliki peran penting dalam menjawab berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pemerintah maupun sektor swasta murni. Di Indonesia, perkembangan startup sosial mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Namun, pertumbuhan ini belum diimbangi dengan dukungan kelembagaan dan kebijakan sistematis, terutama dalam hal penguatan kapasitas usaha. Salah satu pendekatan yang sangat dibutuhkan adalah inkubasi bisnis dan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Inkubasi bisnis adalah proses pembinaan dan pengembangan startup dalam tahap awal, yang biasanya berlangsung selama 6–24 bulan, dan mencakup berbagai dukungan seperti pelatihan, mentoring, akses jaringan, hingga fasilitas kerja. Tujuannya adalah membantu para pendiri startup mengembangkan ide bisnis menjadi usaha yang layak secara ekonomi dan berkelanjutan secara sosial. Sementara itu, pendampingan adalah proses lanjutan yang dilakukan secara intensif maupun berkala, untuk membantu startup menghadapi tantangan selama fase operasional dan pertumbuhan. Dalam konteks startup sosial, inkubasi dan pendampingan bukan hanya sekadar membentuk unit usaha, tetapi juga memperkuat kapasitas dalam menghasilkan dampak sosial yang terukur (Gupita, 2025).

Tantangan Kapasitas Startup Sosial

Banyak startup sosial di Indonesia tumbuh dari akar rumput, didirikan oleh individu atau komunitas yang terdorong oleh semangat perubahan sosial. Namun, semangat tersebut sering kali tidak diiringi oleh kemampuan manajerial dan bisnis yang memadai. Para pelaku startup sosial mungkin memiliki kepedulian tinggi terhadap isu seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan, tetapi mereka kerap mengalami kesulitan dalam menyusun rencana bisnis, melakukan analisis pasar, menyusun laporan keuangan, maupun mengakses pendanaan. Ketiadaan pengetahuan bisnis dasar menyebabkan banyak startup sosial gagal bertahan setelah fase awal. Sebagian besar dari mereka tidak mampu mempertahankan kelangsungan usaha karena tidak memiliki model pendanaan yang berkelanjutan atau tidak dapat mengelola tim secara efektif. Inkubasi bisnis menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ini, yaitu dengan memberikan pelatihan sistematis kepada para pendiri usaha sosial agar mampu menjalankan usaha secara profesional (Rachman et al., 2021). Selain itu, pendampingan memiliki peran penting dalam mengarahkan startup sosial untuk terus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terjadi. Dalam dunia sosial, kebutuhan dan permasalahan masyarakat sangat dinamis dan bisa berubah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, startup sosial harus memiliki kemampuan adaptif, dan hal ini dapat dikembangkan melalui bimbingan yang tepat dari mentor atau fasilitator yang berpengalaman

Peran Inkubasi dalam Membangun Fondasi Bisnis Sosial

Inkubasi bisnis sosial mencakup berbagai aspek penting yang krusial bagi kelangsungan startup. Dari segi pengetahuan dasar bisnis, inkubator menyediakan pelatihan tentang penyusunan rencana usaha, manajemen keuangan, pemasaran sosial, dan strategi pertumbuhan. Materi ini sangat penting karena sering kali tidak dimiliki oleh pendiri startup yang berlatar belakang sosial, pendidikan, atau aktivisme. Inkubator memberikan akses terhadap jejaring strategis, baik dengan lembaga pendanaan, pemerintah, investor sosial, maupun komunitas pengguna. Akses ini membantu startup untuk memperluas skala dampaknya dan menemukan sumber daya yang dibutuhkan, seperti pendanaan hibah, mitra kerja, relawan, atau dukungan kebijakan. Inkubasi juga mencakup validasi model bisnis. Startup sosial sering kali memiliki ide besar, namun belum menguji apakah solusi yang ditawarkan benar-benar dibutuhkan atau diterima masyarakat. Melalui inkubasi, startup dapat melakukan uji coba (*pilot project*) dalam skala kecil, mengukur hasilnya, dan melakukan penyesuaian sebelum melangkah lebih jauh. Dengan demikian, kegagalan usaha dapat diminimalkan.

Fungsi Pendampingan untuk Keberlanjutan Jangka Panjang

Pendampingan menjadi elemen pelengkap yang tidak kalah penting dari inkubasi. Jika inkubasi berfokus pada tahap awal pembentukan usaha, maka pendampingan berperan menjaga keberlanjutan dan stabilitas operasional startup sosial dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, pendampingan mencakup konsultasi bisnis, pengawasan berkala, sesi evaluasi kinerja, serta penyediaan solusi atas persoalan teknis maupun non-teknis.

Melalui pendampingan, startup sosial dapat menerima masukan untuk menghadapi tantangan nyata di lapangan, seperti konflik tim, stagnasi pertumbuhan, perubahan kebijakan pemerintah, atau respon masyarakat terhadap produk sosial yang ditawarkan. Pendamping atau mentor yang memiliki pengalaman dalam bidang sosial maupun bisnis dapat menjadi mitra strategis bagi pendiri startup dalam mengambil keputusan penting. Pendampingan juga penting dalam membangun mentalitas dan daya tahan wirausaha sosial. Berbeda dengan bisnis biasa, startup sosial menghadapi tekanan ganda: mempertahankan keberlanjutan keuangan sekaligus mewujudkan misi sosial. Tidak jarang pendiri startup mengalami kelelahan emosional karena beban moral dan tanggung jawab sosial yang besar. Dalam hal ini, pendamping dapat memberikan dukungan motivasional dan emosional agar semangat sosial tetap terjaga (Mursalim et al., 2020).

Membangun Ekosistem Inkubasi dan Pendampingan di Indonesia

Perlu dibangun ekosistem yang mendukung inkubasi dan pendampingan. Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam membentuk pusat-pusat inkubasi sosial yang berbasis lokal. Selain memberikan pelatihan dan fasilitas, pusat-pusat ini juga dapat berfungsi sebagai ruang kolaborasi dan inovasi antar pelaku usaha sosial.

Program seperti “inkubator sosial desa”, “rumah kreatif sosial”, atau “*social enterprise lab*” bisa menjadi inisiatif yang dikembangkan di daerah. Perguruan tinggi dapat menyediakan mentor akademik dan fasilitas riset, sementara lembaga swasta dapat memberikan dukungan dana CSR dan pelatihan praktis. Pemerintah daerah juga dapat berperan dengan mengintegrasikan inkubasi sosial ke dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM. Selain itu, penting untuk menciptakan standar dan panduan bagi program inkubasi sosial agar hasilnya dapat diukur secara objektif. Pendekatan yang berbasis hasil (*result-based approach*) dan dampak (*impact-oriented*) perlu diterapkan agar startup sosial tidak hanya bertahan secara finansial, tetapi juga benar-benar menciptakan perubahan sosial yang terukur (Nurhayati, 2021).

Kesimpulan

Inkubasi bisnis dan pendampingan memiliki peran krusial dalam menjamin pertumbuhan dan keberlanjutan startup sosial di Indonesia. Startup sosial tidak hanya menghadapi tantangan dalam aspek finansial, tetapi juga dalam pengelolaan usaha, pengembangan strategi, dan penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan. Melalui program inkubasi, pelaku startup sosial memperoleh bekal pengetahuan bisnis dasar, akses jaringan, serta dukungan dalam pengembangan model usaha yang berorientasi pada dampak sosial. Sementara itu, pendampingan yang berkelanjutan memberikan ruang untuk evaluasi, adaptasi, serta penyelesaian permasalahan riil yang dihadapi startup di lapangan. Tanpa adanya inkubasi dan pendampingan, sebagian besar startup sosial berisiko mengalami kegagalan di fase awal karena lemahnya struktur manajerial dan ketidakmampuan mempertahankan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi multi-sektor dalam membangun ekosistem inkubasi dan pendampingan sosial, melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan ini, diharapkan startup sosial dapat tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah sosial di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada para narasumber dari startup sosial dan instansi terkait, yang telah memberikan informasi dan wawasan berharga. Terima kasih juga kepada keluarga, sahabat, serta pihak-pihak yang mendukung secara moral maupun teknis. Semoga karya ini bermanfaat dalam mendukung pengembangan kebijakan keuangan adaptif untuk startup sosial di Indonesia.

Referensi

- Bakhar, M., Harto, B., Gugat, R. M. D., Hendrayani, E., Setiawan, Z., Suriyanto, D. F., Salam, M. F., Suraji, A., Sukmariningsih, R. M., & Sopiana, Y. (2023). *Perkembangan Startup di Indonesia (Perkembangan Startup di Indonesia dalam berbagai bidang)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bismala, L., Andriany, D., & Siregar, G. (2019). Model Pendampingan Inkubator Bisnis Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Medan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 38–44.
- Gupita, F. (2025). Corporate Social Responsibility (CSR) dan Keberlanjutan Bisnis di Era Digital: Studi Pada Start-up yang Bertahan Lebih Dari Lima Tahun. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 63–73.
- Mursalim, S. W., Ravenska, N., & Wijayanti, R. (2020). Penguatan Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi Jawa Barat Melalui Pendampingan Inkubator Bisnis Politeknik Stia Lan Bandung (Strengthen Technology-Based Startup Entrepreneurs In West Java Through Assistance Activities By Politeknik Stia Lan Bandung). *SeTIA Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–9.
- Nurhayati, R. (2021). Peran Inkubator Bisnis dalam Pengembangan Startup Sosial di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 22(1), 45–58. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jmk/article/view/15121>
- Rachman, M. A., Jayusman, J., & Noviarita, H. (2021). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Startup Coop) di Indonesia. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), 1–15.
- Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia: (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 169-179.